



## **Pengaruh belanja daerah sektor pendidikan terhadap jumlah lulusan sekolah menengah kejuruan di provinsi sulawesi tengah**

**Zulyati Hamid<sup>1</sup>, Rusdiah Iskandar<sup>2</sup>, Priyagus<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Email: yulihamida07@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Realisasi Belanja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Realisasi Belanja Program Pendidikan Menengah, Realisasi Belanja Program Minat Bakat dan Kreativitas Siswa terhadap Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang menggabungkan data Realisasi Belanja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Realisasi Belanja Program Pendidikan Menengah, Realisasi Belanja Program Minat Bakat dan Kreativitas Siswa sebagai variabel independen dan Jumlah Lulusan SMK sebagai variabel dependen. Metode Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa Realisasi Belanja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Menengah, Program Minat Bakat Dan Kreatifitas Siswa baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.

**Kata Kunci:** Realisasi belanja program manajemen pelayanan pendidikan, program pendidikan menengah, program minat bakat dan kreatifitas siswa, jumlah lulusan smk

### ***The effect of regional spending on the education sector on the number of vocational high school graduates in the province of Central Sulawesi***

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of the Realization of Education Service Management Program Expenditures, Realization of Expenditure for Secondary Education Programs, Realization of Expenditures for Talent and Student Creativity Programs on the Number of Vocational High School Graduates in Central Sulawesi Province. The data sources used are secondary data, namely data that combines data on the realization of expenditure on education service management programs, realization of spending on secondary education programs, realization of expenditure programs for talent and student creativity as independent variables and number of graduates of SMK as the dependent variable. This research method uses Multiple Regression Analysis. The results of the study prove that the Expenditure of Education Service Management Programs, Secondary Education Programs, Talent Interest Programs and Student Creativity both simultaneously and partially have a significant effect on the Number of Vocational Graduates in Central Sulawesi Province.*

**Keywords:** *Realization of education service management program expenditures, secondary education program, talent interest*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan tolak ukur dari kemajuan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. (Tambunan, 2001).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara adalah akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*), disamping pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Subandi, 2016:87)

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Melalui jumlah sumber daya manusia yang besar,

produktif dan efisien akan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi di negara (daerah) tersebut. Studi empiris di banyak negara menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional atau Gross National Product (GNP) perkapita di banyak negara ditentukan oleh keberhasilan negara tersebut didalam mengembangkan faktor sumber daya manusia, melalui peningkatan produktivitas dan pencapaian efisiensi kerja (Nur Feriyanto, 2014:5)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia juga bersifat timbal balik. Pembangunan manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena tanpa pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak akan dapat dicapai pembangunan ekonomi yang cukup memadai. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Kualitas sumber daya manusia

merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya yang berkualitas tinggillah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan.

Kondisi Sumber Daya Manusia Indonesia masih sangat rendah dan bahkan jauh ketinggalan dengan negara maju, terbukti dengan masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan hal ini disebabkan karena SDM Indonesia kurang terdidik dan tidak memiliki ketrampilan hanya 60% saja yang memiliki pendidikan tinggi mayoritas berada di pulau Jawa, dan banyak juga yang menjadi TKW atau TKI di luar negeri. Berdasarkan data ketenagakerjaan ada tiga isu utama dalam masalah sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkaitan dengan tenaga

kerja yaitu kualitas, kuantitas dan persebaran.

Dari sisi kualitas, sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan. Di sejumlah negara maju, SDMnya berkualitas sangat baik, sehingga walaupun mereka memiliki SDA yang rendahpun, mereka mampu mengolah dengan baik SDA itu. Sedangkan Indonesia, walau memiliki SDA berlimpah, tapi karena SDMnya masih rendah, mereka kesulitan dalam mengolahnya. Faktor yang mempengaruhinya adalah pendidikan.

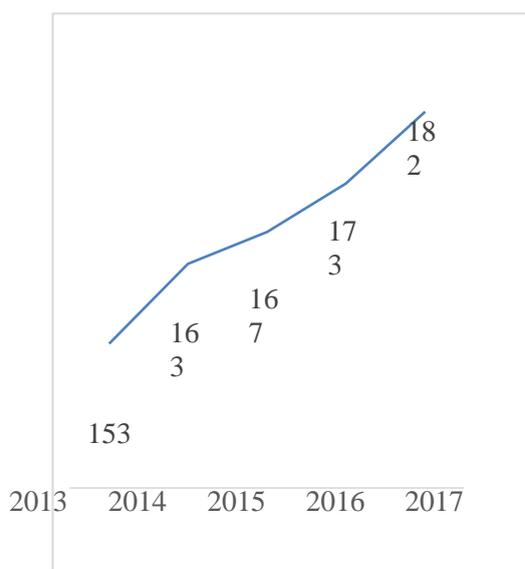
Penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001 sampai sekarang pada dasarnya bertujuan untuk mengefisienkan segala kebijakan yang berkaitan tentang urusan daerah, dengan harapan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masing-masing daerah, sehingga mampu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Salah satu tujuannya

adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyerahan wewenang kepada daerah otonom diikuti oleh beberapa kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah salah satunya adalah disektor pendidikan.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya meningkatkan pertumbuhannya, strategi yang dianggap efektif adalah dengan melakukan industrialisasi. Industrialisasi pada derajat tertentu, mengimplikasikan pergeseran proses produksi dari labouring menjadi manufacturing dalam arti tenaga kerja manusia tergantikan oleh *hard teknologi*. Ini berarti industrialisasi membutuhkan tenaga-tenaga kerja terampil (*skilled workers*) yang tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi tersebut, melainkan juga

memeliharanya. Industrialisasi juga berpotensi menciptakan pengangguran jika pergeseran proses produksi tersebut tidak dibarengi dengan perubahan orientasi pendidikan dari akademis menjadi vokasional. Oleh karena dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, pendidikan semacam SMK menjadi sangat penting.

Pentingnya SMK karena SMK menghasilkan *specific human capital* ketimbang *general human capital* meminjam istilah Becker (1964). Dalam SMK, siswa diprogram untuk berkomitmen pada keterampilan khusus (*specific*) tertentu sehingga ia dapat lebih berkonsentrasi pada usaha untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan itu. Semakin khusus keterampilan alumni SMK, semakin mudah ia mengembangkan keterampilan itu.



**Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2017**

Sumber: DPSMK, data diolah

Pada grafik 1.1 terlihat bahwa perkembangan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan SMK dapat mencerminkan usaha pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan bagi penduduk usia sekolah menengah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Semakin banyak SMK yang tersedia, semakin besar peluang penduduk usia 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikannya sehingga mempertinggi tingkat partisipasi

penduduk usia tersebut untuk bersekolah. Disamping menjanjikan lulusan SMP untuk menempuh pendidikan alternatif, SMK juga menjanjikan DUDI untuk mendapatkan alumni SMK yang terampil dan spesifik. Untuk lebih mendiferensiasi lulusannya, SMK menawarkan beragam

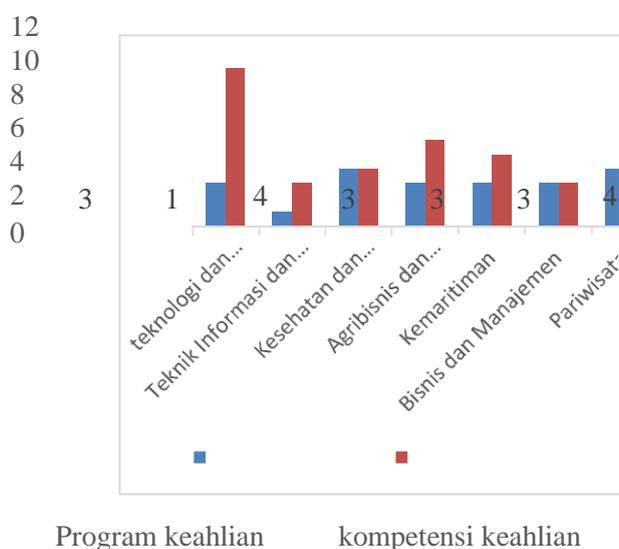
bidang/program keahlian.

Berdasarkan Perdirjen

Dikdasmen No. 06/D.D5/KK

2018 Tentang Spektrum Keahlian SMK/MAK, Tercatat bahwa sampai tahun ajaran

2017/2018 terdapat 9 bidang keahlian, 48 program keahlian, dan 108 kompetensi keahlian untuk program 3 tahun dan 34 kompetensi keahlian untuk program 4 tahun. Namun di Provinsi Sulawesi Tengah baru terdapat 7 bidang keahlian, 21 program keahlian, dan 38 kompetensi keahlian untuk program 3 tahun seperti yang ditunjukkan oleh grafik 1.2 berikut ini :



**Grafik 1.2 Bidang, Program dan Kompetensi Keahlian SMK di Provinsi Sulawesi Tengah 2017**

Sumber: DPSMK, data diolah

Ketersediaan SMK berikut keanekaragaman bidang/program keahlian yang ditawarkan SMK, memberikan menu bagi lulusan SMP untuk menentukan jalur pendidikan lanjutan serta bagi DUDI untuk mendapatkan tenaga terampil yang lebih spesifik. Dengan demikian dapatlah kiranya disimpulkan bahwa SMK telah menawarkan banyak macam bidang/program keahlian, dan jumlah SMK pada tahun 2017 telah meningkat dibanding tahun sebelumnya, dan sudah tersebar relatif merata di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data statistik Provinsi Sulawesi Tengah, sampai pada Tahun 2017 Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki jumlah lulusan sebanyak 10.787 siswa.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, lulusan SMK dari tahun ajaran 2013-2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun ajaran 2014 - 2015 angka kelulusan menunjukkan penurunan sebesar 0,04 % dari tahun sebelumnya. Ketidaklulusan siswa disebabkan oleh banyak faktor antara lain kinerja guru dan rendahnya motivasi belajar siswa. Meskipun UN bukanlah satu-satunya indikator dalam konteks evaluasi hasil belajar, tetapi satu dari banyak indikator untuk menilai kinerja layanan pendidikan.

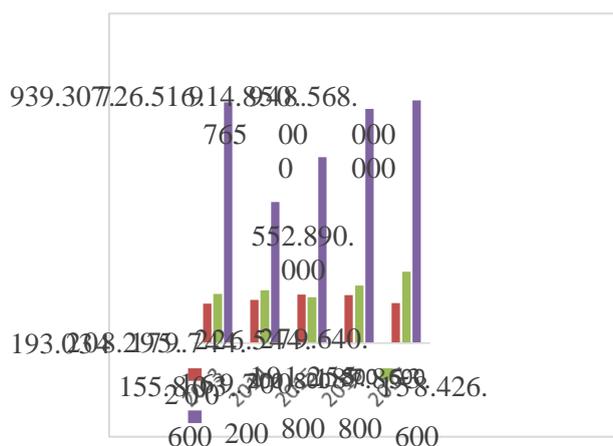
Fenomena rendahnya kualitas lulusan SMK juga diperlihatkan oleh nilai rerata UN per kabupaten/kota tahun 2013/2017 bahwa Kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi

Tengah belumlah merata terbukti dengan hasil NUN yang masih rendah meskipun telah memenuhi Standar kompetensi lulusan (SKL).

Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini tengah giat-giatnya membangun pendidikan khususnya pada sektor pendidikan kejuruan. Penelitian ilmiah (*Visibility Study*) juga dilakukan terhadap pengembangan SMK unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Balitbangda sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berpotensi dikembangkan yakni bidang perikanan dan kelautan, pertanian serta pariwisata. Bidang kelautan dan perikanan dikembangkan karena wilayah Sulawesi Tengah dikelilingi lautan yang sangat luas dan

memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pendapatan daerah dan menghasilkan perekonomian masyarakat. Pengembangan SMK bidang pertanian karena potensi pertanian wilayah Sulawesi Tengah sangat besar. Demikian pula dengan bidang pariwisata, potensi pariwisata Sulawesi Tengah sangatlah menjanjikan namun sebagian destinasi wisata belum dikembangkan dengan baik dan Untuk mengelolah potensi- potensi tersebut, diperlukan tenaga-tenaga terampil yang harus disiapkan dari sekarang khususnya mereka yang dihasilkan dari SMK. Karena diyakini lulusan SMK memiliki keahlian dan keprofesionalisasi sesuai bidang keahliannya.



Anggaran PMPP      Anggaran PPM      Anggaran PMBKS

### Grafik 1.5 Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan Pendidikan Kejuruan di Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2017

Data realisasi belanja langsung program pendidikan kejuruan pada grafik 1.5 memperlihatkan bahwa belanja pendidikan yang telah direalisasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan kejuruan adalah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 peningkatan realisasi belanja terjadi pada Program Pendidikan Menengah yaitu sebesar 0,23 % dari tahun sebelumnya dan realisasi belanja terbesar selama kurun waktu 2013-2017 yaitu

Minat Bakat dan Kreatifitas

Siswa yang mengalami

peningkatan 0.04 % dari tahun

2016, sedangkan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan mengalami penurunan realisasi belanja disebabkan karena pada tahun 2017 beberapa jenis kegiatan telah menggunakan sistem on line sehingga menambah kecil peruntukan belanja pada program tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam sejauh mana pengaruh realisasi belanja daerah melalui program dan kegiatan pendidikan kejuruan terhadap jumlah lulusan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu dalam penelitian ini judul yang diajukan adalah **“Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Jumlah Lulusan Sekolah menengah Kejuruan di Provinsi Sulawesi Tengah”**.  
**RUMUSAN MASALAH**

realisasi belanja yang  
diperuntukan bagi Program

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pembahasan tesis ini dibatasi pada pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Menengah, Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Apakah Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Menengah, Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis pengaruh dan signifikansi Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Menengah, Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa

secara bersama-sama terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Menganalisis pengaruh dan signifikansi Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Menengah, Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa secara parsial terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **TINJAUAN PUSTAKA DAN**

#### **PENELITIAN TERDAHULU**

Abdul Kadir Mahulauw, Dwi Budi Santoso, dan Putu Mahardika (2016), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pendapatan perkapita dan peningkatan IPM kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Hasil analisis

menunjukkan bahwa secara simultan ketiga jenis pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM dan secara parsial pendapatan perkapita sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Provinsi Maluku.

Budi Warman (2016), Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa SMK di Kota Jambi. Tujuan penelitian untuk menganalisis Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Jambi.

Tuatul Mahfud dan Ade Novi (2010), Peran SMK sebagai *Specific Human Capital* Dalam Membangun Perekonomian

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran SMK dalam membangun perekonomian Indonesia. Hasil analisis menunjukkan Terdapat korelasi positif antara SMK sebagai *specific human capital* dengan perekonomian Indonesia

Khairul shaleh (2014), Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Tingkat Kelulusan Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Tingkat Pertama di Provinsi Jawa Tengah. hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap presentase kelulusan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jawa Tengah.

#### **TEORI SCHUMPETER**

Teori schumpeter pertama kali dikemukakan dalam bukunya pada tahun 1911 dalam bahasa Jerman, kemudian pada tahun 1934 dalam bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian teori Schumpeter

yang menggambarkan tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan ditulis dalam bukunya *Business Cycle* pada tahun 1939. Pendapat Schumpeter yang paling penting dan merupakan landasan teori pembangunan adalah keyakinannya bahwa sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat.

Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*. *Entrepreneur* di samping mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat (*total output*), juga mampu memenangkan dalam persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli.

#### **SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NASIONAL**

Mulyadi S (2017:2), Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme.

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup Sumber Daya Manusia (SDM) secara lintas sektoral, diantaranya: (1) Peningkatan kualitas fisik individu meliputi jasmani, rohani, dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan dan pemukiman yang sehat; (2) Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) Sumber Daya Manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang penguasaan ilmu

pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berwawasan lingkungan; serta (4) Peningkatan Pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat dan aparat, serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai program sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

### **Teori Investasi Sumber Daya**

#### **Manusia.**

#### **1. Elchnan Cohn dan**

#### **Psacharopoulos**

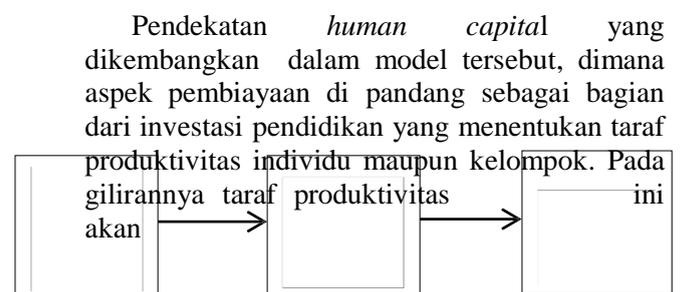
Teori investasi sumber daya manusia adalah suatu teori yang menitik beratkan pada beberapa hal diantaranya pendidikan sebagai penciptaan kemampuan minimal yaitu setiap warga Negara berhak akan pendidikan dasar guna memperoleh kemampuan dasar, seperti program pendidikan wajib belajar

9 tahun, kemudian pendidikan sebagai investasi dan manusia sebagai modal yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) didalam suatu Negara. Teori ini menekankan akan pentingnya keterampilan (*soft skill*) dalam kemajuan ekonomi suatu bangsa , investasi yang baik ialah investasi keterampilan manusia.

Elchnan Cohn (1979) dalam teori ekonomi pendidikan khususnya melalui pendekatan *human capital*, yang ditunjukkan oleh model sebagai berikut:

*Investment in Education* → *Higher Productivity* → *Higher Earning*

**Gambar 2.1 Pendekatan Human Capital Dalam Pendidikan**



mempengaruhi taraf perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh perspektif investasi sumber daya manusia (*Human Capital*).

Teori *human capital* menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (*capital holder*) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Investasi sebagai konsep umum, dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang.

Investasi dalam bidang

SDM memiliki prinsip yang tidak

berbeda dengan konsep investasi manusia yang juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsep SDM atau *Human Capital*.

### **SCHULTZ**

Investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Meningkatnya sumber daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan, sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan yang menurut Schultz dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang paling memiliki hubungan erat dengan

peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Menurut Schultz investasi pada bidang pendidikan tidak hanya berfaedah bagi perorangan, melainkan juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat.

### **KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber - sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah untuk mendorong

terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab

Menurut Mamesah dalam Halim (2008:86), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Semua hak daerah yang meliputi hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain yang menambah kekayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal ini Bastian (2006:102) menyatakan perspektif dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk membiayai tanggungjawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasar azas otonomi daerah. Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jadi keuangan daerah lebih ditekankan pada pengelolaan kekayaan daerah dan digunakan untuk menunaikan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Halim (2008:25) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki atau dikuasai oleh negara.

Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama. Prinsip akuntabi

#### **ANGGARAN PENDAPATAN**

#### **BELANJA DAERAH (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan daerah (Permendagri No.13 Tahun

2006). APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri. Pada era pasca reformasi bentuk APBD di dasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan keputusan tersebut, pada pasal 2 dijelaskan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

### 1. Struktur APBD

APBD adalah kebijakan pemerintah daerah dalam memproyeksi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun. Jadi APBD itu berisi tentang pendapatan, belanja

daerah dan pembiayaan daerah

(lihat pasal 22) Permendagri No.

13 tahun 2006. Pendapatan sendiri adalah, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dalam pasal 25 pada

Permendagri No. 13 Tahun

2006, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah.

2) Dana Perimbangan, yang merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang berupa:

a. Dana Bagi Hasil

Pajak Dan Bukan Pajak

b. Dana Alokasi Umum  
(DAU), dan

c. Dana Alokasi Khusus  
(DAK)

3) Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah, mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam pasal 31, disebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut kelompoknya, belanja daerah dikelompokkan menjadi:

1) Belanja Tidak Langsung, yang merupakan belanja daerah yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

(Gaji dan Tunjangan)

- b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja bantuan Sosial
  - e. Belanja Hibah
  - f. Bantuan keuangan dan
  - g. Belanja tidak terduga
- 2) Belanja Langsung, yang merupakan belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai (Upah, Honorarium, uang lembur dan lain-lain)
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Modal. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan

surplus APBD. Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### **TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH**

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

#### **1. Teori Rostow dan**

#### **Musgrave**

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti

pendidikan, kesehatan, transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik.

Rostow juga mengemukakan bahwa pada tahap menengah pembangunan ditandai adanya pembaharuan- pembaharuan dan peningkatan penanaman modal. Adanya tingkat penanaman modal yang makin tinggi akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pendapatan nasional dan akan melebihi tingkat

pertambahan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan perkapita makin lama makin bertambah besar. Salah satu ciri tahap menengah ini yaitu ditandai dengan berkembangnya sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi.

#### **Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)**

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran

pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut : Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

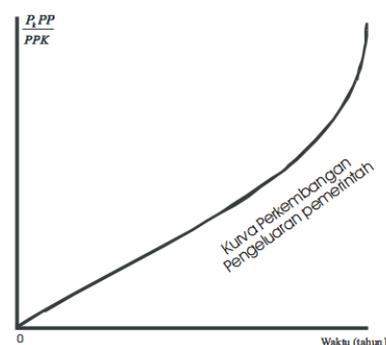
\_\_\_\_\_

$$P_kPP = \text{Pengeluaran pemerintah perkapita}$$

$$PPK = \text{Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk}$$

$$1,2,\dots,n = \text{Jangka waktu}$$

(tahun)



**Gambar 2.2 Pertumbuhan**

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

## 2. Teori Peacock & Wiseman

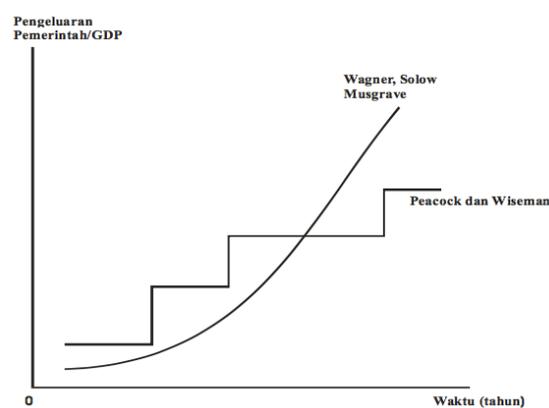
Teori mereka didasarkan pada analisis penerimaan

pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah

membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



**Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Peacock dan Wiseman**

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan

dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan

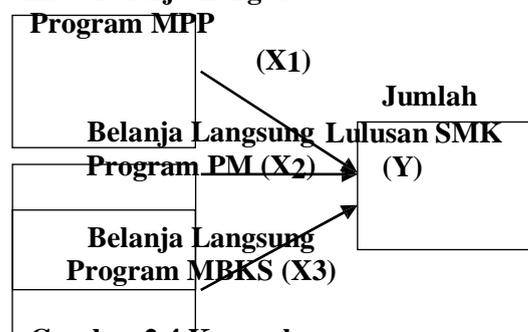
dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan

pengeluarannya.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur atau langkah- langkah pemikiran peneliti dalam penelitian ini. Dalam kerangka konsep di atas, peneliti menggambarkan hubungan antara variabel *independen* (Anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Menengah, Program Minat Bakat dan Kreativitas Siswa terhadap variabel *dependen* Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut: **Belanja Langsung**



### Konseptual Penelitian

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada numerik yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada antara variabel independen dan variabel dependen dimana data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Pusat Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

## METODE ANALISIS

Analisis dalam penelitian ini adalah menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian terhadap satu atau beberapa kejadian lainnya. Kejadian (*event*) dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Analisis dan pengolahan data menggunakan perhitungan-perhitungan statistik

secara komputerisasi dengan

aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Proses perhitungan bisa diselesaikan dengan otomatis dan cepat serta menghasilkan akurasi yang tinggi.

Pengolahan data digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Independen (X), terhadap variabel Dependen (Y) dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui fungsi *Cobb-Douglass* secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 X_1^{b_1} X_2^{b_2} \dots X_n^{b_n} e^{\mu}$$

.....(Soekartawi, 1994:160)  
 bentuk fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Jika memasukan variabel dalam penelitian maka bentuk fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$Y = f(X_1, X_2, X_3)$  Sedangkan model persamaan adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Untuk memudahkan persamaan diatas, maka persamaan tersebut diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut. Pendugaan parameter dapat dilakukan dengan menggunakan analisis dan metode kuadrat terkecil. (OLS : *Ordinary Least Square*) yang diperoleh melalui frekuensi logaritma fungsi asal sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln a + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + e$$

Dimana :

Y = Jumlah Lulusan SMK

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi variabel independen

- X<sub>1</sub> = Realisasi Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  
 X<sub>2</sub> = Realisasi Belanja Langsung Program Pendidikan Menengah  
 X<sub>3</sub> = Realisasi Belanja Langsung Program Minat Bakat dan Kreativitas Siswa  
 E = Error term

### 1) Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien

**Determinasi (R<sup>2</sup>)** Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dimaksudkan untuk mengukur keterkaitan model, yaitu variabel Independen (X) dan variabel

Dependen (Y). Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan

ukuran *goodness of fit* yang artinya jika range mendekati 1, maka nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependennya. Jika range mendekati 0, maka nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependennya.

Nilai koefisien determinasi yang dilambangkan dengan  $0 \leq R^2 \leq 1$ , dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}$$

(Sarwoko, 2005 : 53)

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel dapat digunakan pedoman interpolasi koefisien korelasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1. PEDOMAN INTERPELASI KOEFISIEN KORELASI**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

### 2) Uji F ( Simultan)

Uji simultan yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen..Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara

simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen digunakan formula perhitungan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

(Supranto 2000; 27)

Keterangan :

F = F hitung

$R^2$  = Koefisien determinasi berganda

K = Jumlah variabel independen

N = Jumlah sampel

Rumusan Hipotesisnya adalah: Jika  $H_0 : \beta = 0$  berarti  $X_1, X_2, X_3$  tidak mempengaruhi Y  
Jika  $H_a : \beta \neq 0$  berarti  $X_1, X_2, X_3$

mempengaruhi Y

a. Jika nilai  $F\text{-sig} < \alpha = 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak

b. Jika nilai  $F\text{-sig} > \alpha = 0,05$  berarti  $H_a$  diterima

### 3) Uji t ( Parsial )

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen

digunakan Uji t dengan formula perhitungannya sebagai berikut,

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

(Rangkuti, 1997; 24): Keterangan :

t = t - hitung

$b_i$  = Parameter estimasi

S = Standar error

Rumusan Hipotesisnya adalah: Jika  $H_0 : \beta = 0$  berarti  $X_1, X_2, X_3$  tidak mempengaruhi Y

Jika  $H_a : \beta \neq 0$  berarti  $X_1, X_2, X_3$

mempengaruhi Y

a. Jika nilai  $F\text{-sig} < \alpha = 0,05$  berarti

$H_0$  ditolak

b. Jika nilai  $F\text{-sig} > \alpha = 0,05$  berarti

$H_a$  diterima

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, yang diharapkan data terdistribusi normal/merata. Adapun hasil analisis data untuk uji normalitas data penelitian adalah sebagai berikut : Uji asumsi klasik terdiri atas

## 1. Uji Multikolinearitas

Sebuah persamaan regresi harus bebas dari masalah *multikolinearitas* yaitu tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Pengujian *multikolinearitas* dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS dengan output berupa nilai *Tolerance* dan VIF. Santoso (2001; 206) memberi pedoman bahwa “suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1”.

## 2. Uji Autokorelasi

Selain memenuhi Normalitas, persamaan regresi juga perlu memenuhi asumsi *autokorelasi*. Asumsi *autokorelasi* menekankan pada kebebasan data. Dalam artian data untuk suatu periode tertentu tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya. Pengujian *autokorelasi* dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Durbin Watson* (D-W) melalui bantuan program SPSS versi 17. Oleh

Santoso (2001; 182) memberi pedoman yaitu:

- 1) Angka Durbin Watson di bawah -2 berarti ada korelasi positif.
- 2) Angka Durbin Watson di antara -2 sampai +2 tidak ada *autokorelasi*.
- 3) Angka Durbin Watson di atas +2 berarti ada korelasi negatif

## **PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah lembaga pendidikan formal setingkat SMA. SMK ini menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau sederajat. Berbeda dengan SMA, SMK mempelajari materi dan banyak di prakteknya. SMK merupakan jenis pendidikan menengah yang secara khusus mempersiapkan tamatannya untuk menjadi tenaga terampil dan siap terjun ke dalam masyarakat luas. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain- lain. Oleh karena itu, Ujian Nasional dan Ujian Kompetensi Keahlian dilaksanakan sebagai indikator untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan. UN/UKK juga merupakan salah satu indikator dari kelulusan siswa.

## **BELANJA LANGSUNG SEKTOR PENDIDIKAN KEJURUAN**

Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Menengah, Program Minat Bakat dan Kreativitas siswa merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota yang tujuannya diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan DUDI sebagai pengguna lulusan melalui kegiatan penyesuaian kurikulum, penataan dan pemetaan kompetensi keahlian, mengevaluasi pengimplementasian kurikulum 13, mengadakan workshop kurikulum 13 dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga

pendidik,, rakor bagi kepala sekolah, melaksanakan ujian nasional dan ujian kompetensi, dimana kegiatan-kegiatan tersebut sangat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibentuk oleh jumlah lulusan SMK.

## PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Regresi Linier

#### Berganda

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, digunakan pendekatan OLS (*Ordinal Least Square*) atau metode kuadrat terkecil yang dibentuk oleh tiga variabel bebas (X1, X2, X3) dan satu variabel terikat (Y). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan teknis analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda yang telah penulis lakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Variabel	Koefisien	t	hitung	Sig
1	Konstanta	0.609			
2	X1	0.749	7.133	0.003	
3	X2	0.438	1.581	0.030	
4	X3	0.621	2.943	0.023	

Sumber : data diolah 2018

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel diatas dapat dituliskan

persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 0.609 + 0.749 X_1 + 0.438 X_2 + 0.621 X_3 + e$$

Nilai koefisien dari masing-masing variabel dapat diartika sebagai berikut

:

1. Tabel 5.5 menunjukkan bahwa diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 0.609 yang berarti tanpa adanya pengaruh dari ketiga variabel bebas maka nilai variabel terikat hanyalah sebesar 0.609. Koefisien regresi Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (X1) sebesar 0.749 yang menyatakan jika terjadi penambahan Belanja Langsung Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar 1 persen maka akan cenderung menaikkan elastisitas jumlah lulusan SMK sebesar 0.749 persen dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*). Nilai probability sebesar 0.003, jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan ( $\alpha=0.05$ ), maka terbukti bahwa nilai probability lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ( $0.003 < 0.05$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang

signifikan dari Belanja Langsung Program MPP terhadap Jumlah Lulusan SMK. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

2. Koefisien regresi Belanja Langsung Program Pendidikan Menengah (X2) sebesar 0.438 yang menyatakan bahwa jika terjadi penambahan Belanja Langsung Program Pendidikan Menengah sebesar 1 persen maka akan cenderung menaikkan elastisitas jumlah lulusan SMK sebesar 0.438 persen dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*). Nilai probability sebesar 0.030, jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan ( $\alpha=0.05$ ), maka terbukti bahwa nilai probability lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ( $0.030 < 0.05$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari Belanja Langsung Program PM terhadap Jumlah Lulusan SMK. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.
3. Koefisien regresi Belanja Langsung Program Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (X3) sebesar 0.621 ini berarti

bahwa apabila terjadi penambahan alokasi Belanja Langsung Program Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa sebesar 1 persen maka akan berdampak pada kecenderungan kenaikan elastisitas jumlah lulusan SMK di Provinsi Sulawesi tengah sebesar 0.621 persen dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*). Nilai probability sebesar 0.023, jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan ( $\alpha=0.05$ ), maka terbukti bahwa nilai probability lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ( $0.023 < 0.05$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari Belanja Langsung Program Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa terhadap Jumlah Lulusan SMK. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Langsung

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan meningkatnya belanja langsung program manajemen pelayanan pendidikan akan meningkatkan jumlah lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Realisasi Belanja Langsung Program Pendidikan Menengah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah. Adanya peningkatan belanja langsung program pendidikan menengah akan meningkatkan jumlah lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Realisasi Belanja Langsung Program Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah. Adanya peningkatan dari belanja langsung program Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa akan meningkatkan jumlah lulusan

SMK di Provinsi Sulawesi

Tengah.

### **IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Tatanan ekonomi dunia sedang berubah ke- era perdagangan bebas dan investasi bebas, dimana perdagangan barang dan jasa antar negara tidak lagi mengalami hambatan-hambatan yang berarti dalam quota dan tarif. Bentuk perdagangan bebas di era global ini dampaknya adalah Indonesia harus mempersiapkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetensi dan standarisasinya mengikuti kualifikasi dunia. Penerapan teknologi baru dalam industri mengandung konsekuensi peningkatan permintaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas. Oleh karena itu ada beberapa saran yang diberikan baik kepada pihak pemerintah maupun swasta diantaranya :

1. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pendidikan kejuruan tingkat menengah, memiliki peran besar

dalam merencanakan dan menciptakan SDM yang profesional dan produktif. Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam rangka menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga Pendidikan yang mempunyai misi menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang mampu mengisi lapangan kerja dan berkualitas profesional diharapkan mampu berperan sebagai alat unggulan bagi industri-industri Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Pendidikan kejuruan juga merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan syarat utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan, dan untuk perubahan sosial. Anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN, melalui transfer pusat ke daerah

pemerintah daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih cerdas dan profesional dalam mengelolanya, sehingga manfaatnya benar - benar dirasakan oleh masyarakat. Titik berat penganggaran pendidikan lebih difokuskan pada pilar-pilar utama untuk menuju pada pendidikan yang bermutu seperti : Pembinaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan DUDI, Peningkatan mutu tenaga pendidik/kependidikan, mutu siswa melalui Pendidikan dan pelatihan yang merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia, sehingga mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja.

2. SMK memiliki peran dan dampak yang sangat penting, SMK sebagai suatu entities memiliki peranan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sebagai suatu entitas ekonomi,

keberadaan SMK dapat berperan sebagai *special endowment factor* dalam perekonomian di daerah. Peran ini akan semakin berdaya guna dengan serangkaian proses pembelajaran di SMK yang lebih mengedepankan aspek skills dalam membentuk kualitas SDM. Peranan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengharmonisasikan program keahlian SMK sangat dibutuhkan. Untuk merevitalisasi SMK tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit kebutuhan dana tersebut di hitung berdasarkan kebutuhan revitalisasi pada bidang infrastruktur, antara lain untuk membangun laboratorium,, pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis (*teaching factory*), ruang kelas baru dan peralatan pendukung kegiatan praktik dan belajar. Kebutuhan revitalisasi bukan hanya pada bidang infrastruktur saja, tetapi juga pada kompetensi guru dan tenaga kependidikannya karena kualitas guru sangat menentukan tercapai atau tidaknya peningkatan

kompetensi/mutu lulusan SMK. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih profesional dalam mengelolah serta mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhannya. Dengan demikian anggaran yang diperuntukan bagi peningkatan mutu pendidikan benar-benar tepat sasaran

3. SMK sebagai lembaga pendidikan kejuruan merupakan awal titik balik sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial di masyarakat. SMK diharapkan mampu menciptakan efek ganda yaitu mendorong capaian pendidikan warga sekaligus juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. SMK merupakan bagian tak terpisahkan dari sektor ekonomi, yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sistem SMK perlu ditingkatkan (*improved*) baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas SMK mencerminkan kualitas angkatan kerja di Provinsi Sulawesi tengah, yang perlu dikembangkan terus-

menerus untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia di Provinsi Sulawesi tengah. SMK juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran (*jobless index*) di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karenanya Relevansi Kompetensi lulusan SMK dengan industry juga terus di lakukan dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjangir industri-industri yang relevan dengan program revitalisasi sehingga setiap tahunnya serapan lulusan SMK terhadap dunia industri terus meningkat.

4. Peran SMK dalam mendukung ekonomi daerah, sangat dipengaruhi oleh bagaimana SMK menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil dan siap kerja. Sehingga akan tercipta lulusan SMK yang berkualitas, dan merekalah yang akan menjadi penentu di pasar tenaga kerja, dan pada gilirannya, menjadi penyumbang pertumbuhan ekonorni daerah. Diperlukan peranan pemerintah dalam Memfasilitasi SMK yang besar maupun yang sedang.

Mereka diberikan dukungan fasilitas ruang, alat dan juga yang lain agar daya tampungnya bisa meningkat.

5. Keterserapan alumni SMK dalam pasar tenaga kerja berarti penciptaanincome bagi alumni SMK, sekaligus pendapatan bagi daerah (dalam bentuk PDRB) di mana alumni tersebut bekerja. Peran inilah yang kemudian menjadikan SMK menjadi suatu *engine sector of growth* dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui peran ini, SMK akan menciptakan multiplier effect di bidang ekonomi yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun untuk mengembangkan dunia usaha dan industry di era globalisasi. Upaya Mengajak masyarakat ikut serta sebagai bagian dari gerakan pelibatan masyarakat dalam mengelolah dan mengembangkan peningkatan layanan SMK dari sisi akses yaitu Pemerintah terus melakukan pendekatan (*approach*) terhadap dunia usaha dan industri (DUDI) dan mengajak mereka

untuk mau membantu program revitalisasi SMK dan memberikan prioritas khusus pada program keahlian yang dirasa sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu bidang pariwisata, pertanian dan kemaritiman, yang tentunya disesuaikan dengan pengembangan potensi wilayah dan sebaran lokasi sekolah.

6. Bagi peneliti selanjutnya, variabel yang digunakan dalam penelitian diharapkan lebih lengkap dan bervariasi lagi dengan menambah variabel independen lain maupun variabel dependen baik ukuran- ukuran atau jenis-jenis indikatornya agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta; Salemba Empat.
- Budi Warman (2016), *Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa SMK di Kota Jambi*.
- Cohn, Elchanan. (1979). *The Economic of Education, Revised Edition*, Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Co.
- Dikmenjur. Tahun (2008). *Peran SMK dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jakarta : Dikmenjur.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta; Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Perananan SMK Teknologi Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur*. Jakarta: Dikmenjur.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah (2013/2017), *Realisasi Belanja*
- Krikunto, Suharsimi. (2009). *Dasar - Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik, (2013/2017), *Jumlah Sekolah dan Siswa SMK Menurut Provinsi*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Gallogh, T. (1969), "Education and Agrarian Progress in Developing Countries", dalam Hufne, K. & J. Naumann (eds.), *Economics of Education in Transition*, Stuttgart: Ernst Klett, h.259-68.
- Pastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Langsung Program Pendidikan  
Kejuruan/SMK.

daerah, Pendekatan Makro, PPPEB UGM  
Yogyakarta

Djohar, Ashari. (2007). *Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jurnal Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Pedagogiana Press hal 128-130.

J. Supranto, (2000), *Statistik (Teori dan Aplikasi), Edisi Keenam*, Jakarta, Erlangga

Djojonegoro Wardiman. (1998).  
*Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta ; Jayakarta Agung.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No  
29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan,  
Pertanggungjawaban dan Pengawasan  
Keuangan Daerah  
Serta Tata Cara penyusunan APBD,  
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah  
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah,  
[www.Keuda.Kemendagri.go.id](http://www.Keuda.Kemendagri.go.id)

Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*,  
Bandung: Remaja Rosdakarya,  
2008, Cet. 9

Feriyanto, Nur. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*,  
Yogyakarta, UPP STIM YKPN

Mahfud, Tuatul dan Ade Novi (2010) :*Peran SMK sebagai specific human capital dalam membangun perekonomian Indonesia*

Gronlund, Norman E. dan Robert L. Linn.(1990). "*Measurement and Evaluation in Teaching*. New York ? Vlacmillan Publishing Company."

Mahulauw, Abdul Kadir;Dwi Budi Santoso, dan Putu Mahardika (2016) : *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Terhadap Pendapatan Perkapita dan dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku*

Grubb, W. N. (1985), "*The Convergence of Educational System and the Role of Vocationalism*", *Comparative Education Review*, 29 (4), h.526-548."

Mamesah, D, J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun  
2016 Tentang Revitalisasi SMK,  
<https://www.kemdikbud.go.id>

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor  
06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni  
2018 tentang Spektrum

Jaya Kirana, Wihana, (1999),  
*Analisis Potensi Keuangan*

- Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2018 *Tentang Pemberdayaan Industri.* Sipuu.setkab.go.id  
\_ No 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* www.psmk.kemdikbud.go.id
- \_ No 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Permendagri No 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* www.keuda.kemendagri.go.id
- Permendiknas No 75 Tahun 2009, *Tentang Ujian Nasional.* Bsnp- indonesia.org
- Psacharopoulos, G. (1997), "Vocational Education and Training Today: Challenges and Responses", *Journal of Vocational Education and Training*, 49 (3), h.385-393
- Rangkuti, Freddy. (1997). *Riset Pemasaran.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Singgih (2001). *SPSS Versi 10 : Mengolah Data Statistik Secara Profesional.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sarwoko. (2005). *Metodologi Penelitian.* Jogjakarta : Pustaka Belajar.
- Schultz, Theodore, W .(1961). *Investment in Human Capital. The American Economics Review, No. 51.*
- Shaleh, Khairul (2014) : *Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Tingkat Kelulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.*
- Statistik Pendidikan dan kebudayaan. publikasi.data.kemdikbud.go.id.
- S, Mulyadi. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi. (1994). *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sowiyah. (2010), *Pengembangan Kompetensi Guru SD.* Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Subandi. (2016). *Ekonomika Pembangunan,* Bandung : Alfabeta.

- Sugiarto (2009). *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Asimetri*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Sugiyono, (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko, (1998). *“Pengantar Ekonomi Makro”*. BPFE-UGM Yogyakarta.
- Sutrisno, T (2006), *Teknologi Penyediaan Air Bersih, Cetakan Keenam*, Jakarta : Rhineka Cipta.
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2013). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan kedua. Bandung : Alfabeta.
- Toyaman dan Usman. (2004). *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*.
- Undang - Undang RI No 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://www.komisiinfo.rmasi.go.id>
- No 25 Tahun  
2004 *Tentang Sistem*

*Perencanaan Pembangunan Nasional*. <https://kemenag.go.id>